



Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

URL: <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal>



Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan pada Industri Sumber Daya Alam di Bursa Efek Indonesia

William Wahyu Wicaksono Ramadhanta Noor ^{a,1,*}, Nicholas Kurniadi ^{a,2}, Vania Pradipta Gunawan ^{a,3}, Theodorus Radja Ludji ^{a,4}

^a School of Business and Economics, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia

¹ williamwahyuwicaksono@gmail.com, ² nicholaskurniadi.s4@gmail.com, ³ vania.gunawan@pmbs.ac.id, ⁴ theodorus.ludji@pmbs.ac.id

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 13 July 2023
Revised : 01 March 2024
Accepted : 30 March 2024

Keywords

Natural resources
Legitimacy
Sustainability report
Board characteristics

Kata Kunci

Sumber daya alam
Legitimasi
Laporan keberlanjutan
Karakteristik dewan

ABSTRACT

The natural resource industry is known for its environmental issues, making it needs to establish legitimacy. Sustainability reports can be a tool for companies in this industry to communicate their sustainability efforts and gain legitimacy. This study aims to examine the influence of board characteristics on the quality of sustainability reporting. Content analysis techniques and multiple regression with fixed effect models were used to analyze 92 publicly listed companies from the natural resources industry in Indonesia in 2016-2021 as samples. Results of this study show that the independence of the board of commissioners has a negative effect on the quality of sustainability reporting. On the other hand, the accounting and/or financial experience of the board of directors has a positive impact on sustainability reporting quality. Therefore, investors should not appoint board members merely for complying with regulations, but rather appoint members who have proper experience that can effectively support the company's sustainability initiatives.

ABSTRAK

Industri sumber daya alam identik dengan isu lingkungan, sehingga perlu menetapkan legitimasinya. Laporan keberlanjutan dapat menjadi sarana bagi perusahaan di industri ini untuk mengkomunikasikan usaha keberlanjutan mereka serta memperoleh legitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Teknik content analysis dan regresi berganda model *fixed effect* digunakan untuk menganalisis 92 perusahaan terbuka di industri sumber daya alam di Indonesia pada tahun 2016-2021 sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Di sisi lain, pengalaman akuntansi dan/atau keuangan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Oleh sebab itu, investor sebaiknya tidak mengangkat anggota dewan hanya sekedar untuk memenuhi regulasi, namun perlu mengangkat anggota yang mempunyai pengalaman memadai yang dapat secara efektif mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran pelaku bisnis akan pentingnya pelaporan keberlanjutan telah mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai inisiatif yang berfokus pada hal tersebut. Sustainability atau keberlanjutan seperti dikemukakan oleh Moaveni (2022) yang diambil dari *United Nations Brundtland Commission Report* tahun 1987 adalah mengenai “tindakan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka”. Peningkatan kesadaran akan inisiatif keberlanjutan juga terlihat lewat dicetuskannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *United Nations Conference* terkait sustainability pada tahun 2012 (Walker et al., 2019). Beberapa bagian literatur terkait keberlanjutan juga berargumen bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif pelaporan keberlanjutan pada perusahaan perlu untuk diteliti lebih lanjut karena dapat berkaitan dengan perkembangan bisnis kontemporer (Dorn et al., 2022; Elaigwu et al., 2024; Erin et al., 2022; Githaiga & Kosgei, 2023; Kumar et al., 2022; M. Shamil et al., 2014; Rudyanto & Veronica Siregar, 2018; Saepudin et al., 2021).

Penyediaan informasi keberlanjutan dapat dilakukan melalui sustainability reporting atau pelaporan keberlanjutan, yang produknya berupa *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. Dengan adanya pertumbuhan kesadaran atas isu keberlanjutan secara global, diperlukan evaluasi atas kualitas laporan keberlanjutan yang tujuannya tidak hanya untuk mengkritisi, tapi juga mendorong inisiatif bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan (Adhariani & du Toit, 2020). Kualitas pelaporan keberlanjutan dapat dilihat melalui sejauh mana pengungkapan yang dilakukan melebihi persyaratan peraturan, atau dengan kata lain, sejauh mana pengungkapan sukarela melengkapi informasi yang wajib dilaporkan (Githaiga & Kosgei, 2023). Pelaporan untuk mematuhi peraturan mengacu pada POJK 51, sedangkan untuk memberikan informasi lebih, perusahaan dapat menggunakan standar pelaporan global, seperti standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiatives* (2016). Penelitian ini melihat terkait sejauh mana pelaporan keberlanjutan di industri sumber daya alam Indonesia yang dilihat tidak hanya dari komponen core (wajib) saja, melainkan juga komponen *comprehensive*-nya (sukarela).

Pada penelitian ini, untuk mengukur kualitas laporan keberlanjutan, digunakan *scoring* yang berasal dari penelitian Farhana & Adelina (2019). Pengukuran yang dilakukan didasarkan pada konsep *occurrence*, yaitu pemeriksaan terhadap ada tidaknya pengungkapan suatu item indikator. Indikator yang digunakan pada penelitian Farhana & Adelina (2019) berasal dari standar GRI 2016. Penelitian ini juga akan menggunakan standar GRI 2016 karena pelaporan keberlanjutan di Indonesia pada tahun dimana penelitian ini dilakukan mayoritas menggunakan standar pelaporan GRI 2016.

Terdapat beberapa industri yang sensitif terhadap isu keberlanjutan karena dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, salah satunya adalah industri berbasis sumber daya alam. Di Indonesia, dengan meninjau definisi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) terdapat dua kelompok industri yang termasuk dalam industri sumber daya alam, yaitu industri pertambangan (*mining*) dan pertanian (*agriculture*). Industri pertambangan dan agrikultur memiliki kesamaan tinggi terkait dampaknya terhadap lingkungan, sehingga banyak penelitian yang membahas kedua industri ini secara bersamaan ketika membahas isu keberlanjutan, misalnya terkait ekstraktif atau pengambilan sumber daya alam (Dorn et al., 2022), polusi air (Liu et al., 2021), bahan kimia yang lebih ramah lingkungan maupun inovasi teknologi untuk menangani eksploitasi sumber daya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, perusahaan dalam industri ini juga kesulitan dalam menunjukkan legitimasinya kepada pemangku kepentingan. Meskipun demikian, industri sumber daya tetap merupakan industri yang vital bagi Indonesia karena merupakan penghasil komoditas utama negara (Putri & Gischa, 2021). Berdasarkan POJK 51 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), perusahaan pertambangan dan agrikultur termasuk dalam kategori perusahaan terbuka yang wajib melaporkan laporan keberlanjutan mulai tahun buku 2021. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis laporan keberlanjutan pada industri pertambangan dan agrikultur di Indonesia.

Implementasi tata kelola perusahaan yang efektif merupakan faktor kunci kesuksesan bisnis dalam jangka panjang (Buallay & Al-Ajmi, 2020). Dewan sebagai organ yang mempunyai wewenang dalam menjalankan perusahaan mempunyai pengaruh yang besar dalam keberlanjutan Perusahaan (Kumari et al., 2022). Dewan telah terbukti mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengungkapan sesuai standar pelaporan keuangan (Mnif & Borgi, 2020). Digunakan empat karakteristik dewan untuk menganalisis pengaruh tata kelola terhadap

kualitas pelaporan keberlanjutan, yaitu keberagaman gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan pengalaman dewan direksi. Pemilihan variabel ini konsisten dengan literatur tata kelola kontemporer (Elaigwu *et al.*, 2024; Erin *et al.*, 2022; Githaiga & Kosgei, 2023; Kumar *et al.*, 2022; Rudyanto & Veronica Siregar, 2018; Saepudin *et al.*, 2021; Thun & Zülch, 2023).

Erin *et al.* (2022) serta Githaiga & Kosgei (2023) menemukan adanya pengaruh positif keberagaman gender dewan direksi terhadap pelaporan keberlanjutan. Namun, terdapat pandangan yang bertentangan dan menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara dewan direksi perempuan dengan laporan keberlanjutan (M. Shamil *et al.*, 2014) dan tidak adanya pengaruh signifikan antara keberagaman gender dewan direksi dengan laporan keberlanjutan (Kumari *et al.*, 2022). Dalam literatur terdahulu terkait tata kelola perusahaan, ditemukan bahwa semakin tinggi proporsi direktur independen dalam dewan dapat meningkatkan mekanisme tata kelola dan efektivitas dewan dalam suatu perusahaan (Githaiga & Kosgei, 2023; Kumari *et al.*, 2022). Namun, terdapat juga pandangan yang berbeda, dimana terdapat hubungan negatif antara independensi dewan dengan kualitas laporan keberlanjutan (Kumar *et al.*, 2022). Selain itu, juga terdapat hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara independensi dewan dengan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan (Erin *et al.*, 2022; Jamil *et al.*, 2021; Kumar *et al.*, 2021; Saepudin *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat berbagai pandangan bertentangan terhadap pengaruh ukuran dewan direksi terhadap laporan keberlanjutan. Pertama, terdapat pandangan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan (Erin *et al.*, 2022; Kılıç & Kuzey, 2019; Thun & Zülch, 2023). Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama, yang justru menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan ukuran dewan direksi (Elaigwu *et al.*, 2024; Githaiga & Kosgei, 2023). Pandangan lain dikemukakan oleh Kumar *et al.* (2022) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Penelitian ini spesifik membahas pengalaman dewan direksi di bidang keuangan dan/atau akuntansi. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara pengalaman dewan direksi dan kualitas laporan keberlanjutan (Erin *et al.*, 2022; Githaiga & Kosgei, 2023). Di sisi lain, berdasarkan penelitian Al-Qahtani & Elgharrawy (2020), ditemukan terdapat pengaruh negatif antara pengalaman dewan direksi dengan kualitas keberlanjutan. Akan tetapi Bear *et al.* (2010) dan Umukoro *et al.* (2019) mendapatkan hasil yang berbeda, yakni bahwa pengalaman dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keberlanjutan. Pada sistem *two-tier*, terdapat dua dewan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris selaku pengawas perusahaan (Putra, 2023). Dikarenakan sampel penelitian berasal dari negara Indonesia yang menganut sistem *civil law*, maka pada penelitian ini, akan digunakan independensi dewan komisaris sebagai variabel independen.

Untuk menganalisis *research gap*, penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia. Pemilihan negara Indonesia dimotivasi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi (Gunawan *et al.*, 2022). Akan tetapi, biodiversitas di Indonesia terus mengalami kerusakan akibat laju aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan industri sumber daya alam, seperti pertambangan (Maskun *et al.*, 2021). Selain itu, penelitian terkait kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia semakin menarik setelah dikeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka mulai tahun buku 2021 (Adhariani & du Toit, 2020). Hal yang juga menarik adalah bahwa masih jarang ditemukan riset-riset pengaruh tata kelola; secara khusus mengenai karakteristik dewan direksi dan komisaris; terhadap laporan keberlanjutan yang spesifik membahas industri yang sensitif terhadap isu lingkungan.

Berdasarkan penjabaran yang telah diberikan, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik dewan (ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, keberagaman gender dewan direksi, dan pengalaman dewan direksi) terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur pelaporan keberlanjutan di Indonesia, terutama terhadap analisis pengaruh faktor karakteristik dewan terhadap pelaporan keberlanjutan di industri berbasis sumber daya alam, yang meliputi pertambangan dan agrikultur. Penelitian ini juga memperbarui dan memperluas hasil dari penelitian terdahulu dalam konteks Indonesia dan industri sumber daya alam. Penelitian ini memiliki perbedaan

dibanding penelitian sebelumnya karena secara khusus melihat beberapa atribut karakteristik dewan seperti keberagaman gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, serta ukuran dan pengalaman dewan direksi terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Hal ini menjadi penting oleh karena inisiatif pelaporan keberlanjutan yang mulai diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2021 membuat perusahaan menjadi lebih aware terhadap inisiatif keberlanjutan dalam aktivitas mereka (Lusiana & Sari, 2023). Adapun hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi yang relevan terhadap praktik manajerial di Indonesia terutama yang berkaitan dengan inisiatif pelaporan berkelanjutan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Seprina et al., 2023).

2. Kajian Literatur

2.1. Legitimacy Theory

Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa organisasi berusaha membentuk kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan aktivitasnya, dengan norma perilaku yang diterima dalam sistem sosial. Rankin et al. (2017) menyatakan bahwa teori legitimasi dapat digunakan untuk memahami tindakan dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial menjelaskan interaksi antara masyarakat dengan perusahaan, yang berkaitan dengan ekspektasi masyarakat tentang bagaimana bisnis seharusnya bertindak agar tetap bertahan di masa depan (Rankin et al., 2017). Jika perusahaan tidak dapat menjaga operasi sesuai kontrak sosial, maka masyarakat dapat “mencabut” kontrak yang sebelumnya telah diberikan melalui perpindahan ke perusahaan lain (Rankin et al., 2017).

Rankin et al. (2017) menyatakan bahwa teori legitimasi telah umum digunakan untuk menjelaskan pengungkapan keberlanjutan atau informasi *corporate social responsibility*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori legitimasi dapat menjelaskan kebijakan pengungkapan isu lingkungan dan sosial ketika legitimasi perusahaan berada dalam posisi terancam dengan cara menyajikan lebih banyak “berita baik”. Ikpor et al. (2022) menyatakan bahwa perusahaan dalam industri dengan *environmental footprint* yang tinggi cenderung lebih mengkomunikasikan usaha keberlanjutan mereka untuk mendapatkan legitimasi.

2.2. Resource Dependency Theory

Pfeffer & Salancik (2003) menyatakan bahwa organisasi tertanam dalam jaringan interdependensi dan hubungan sosial. Kebutuhan akan sumber daya, termasuk sumber daya finansial, fisik, dan informasi, yang didapatkan dari lingkungan luar, menyebabkan perusahaan bergantung pada sumber eksternal. Hal ini yang disebut sebagai *resource dependence* (Pfeffer & Salancik, 2003). Dengan kata lain, *resource dependence theory* menjelaskan bagaimana sumber daya eksternal dapat mempengaruhi operasi dan perilaku sebuah perusahaan (Jamil et al., 2021).

Resource dependence theory umumnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dewan direksi sebagai sumber daya perusahaan yang mempunyai jaringan, serta kompetensi dan kualifikasi profesional, dapat menyediakan strategi dan sumber daya untuk kelangsungan perusahaan (Jamil et al., 2021). Menurut Nurulyasmin et al. (2018), direksi dengan keahlian terspesialisasi, seperti hukum, keuangan, dan pemasaran, menjadi sumber daya berharga dalam memberikan arahan dan saran dalam pelaporan keberlanjutan.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Keberagaman Gender Dewan Direksi

Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan keberagaman gender dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Erin et al., 2022; Githaiga & Kosgei, 2023). Pengaruh positif signifikan didasari oleh *resource dependence theory* yang menjelaskan bahwa dewan yang lebih beragam akan lebih efektif dan mempunyai pemahaman lebih terkait kompleksitas perusahaan (Githaiga & Kosgei, 2023). Berdasarkan teori tersebut, keberagaman gender dewan memberikan *resources* yang dapat mendukung manajemen dan memberikan *competitive advantage*, lalu juga memastikan integritas laporan (Wahid, 2019). Oleh karena itu, karena mempunyai pemahaman lebih

terkait kompleksitas perusahaan, keberagaman gender dewan direksi juga dapat memastikan integritas pelaporan laporan keberlanjutan. Integritas pelaporan yang tinggi akan meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan, sekaligus legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Hal tersebut dapat didukung berdasarkan *legitimacy theory*.

Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan (M. Shamil *et al.*, 2014). Terdapat argumen yang diberikan terkait hubungan negatif keberagaman gender dewan oleh Muttakin *et al.* (2015) yang berpendapat berdasarkan perspektif budaya bahwa peran direksi perempuan bisa terbatas di negara berkembang dan menimbulkan persepsi bahwa keanggotaan dewan perempuan hanya merupakan tanda tokenisme saja. Namun, terdapat juga temuan bahwa tidak adanya pengaruh keberagaman gender dewan direksi terhadap pelaporan keberlanjutan (Kumar *et al.*, 2022).

Pada industri pertambangan Indonesia, Setiawan *et al.* (2018) menemukan bahwa keberagaman gender dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita memiliki peran positif terhadap pengungkapan (Setiawan *et al.*, 2018). Hal yang sama juga ditemukan dalam industri sumber daya alam di Indonesia. Winarsih & Solikhah (2015) menemukan pengaruh positif keberagaman gender dewan direksi terhadap pengungkapan keberlanjutan dengan argumen yang digunakan adalah dewan berjenis kelamin wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat jika dibandingkan dengan yang berjenis kelamin pria. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

2.3.2. Independensi Dewan Komisaris

Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan independensi dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Githaiga & Kosgei, 2023). Pengaruh positif signifikan terjadi dikarenakan dewan yang independen dapat memastikan efektivitas dewan melalui pengawasan atas agen dan operasi internal (Erin *et al.*, 2022). Berdasarkan *legitimacy theory*, independensi dewan meningkatkan keinginan menunjukkan legitimasi ke *stakeholders* (Erin *et al.*, 2022). Dewan yang independen, cenderung memuaskan berbagai *stakeholders* dengan menyediakan informasi yang berkualitas (Erin *et al.*, 2022).

Di sisi lain, terdapat beberapa yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan independensi dewan (Ekaputri & Eriandani, 2022; Hamidah, 2020; Idawati & Hanifah, 2022; Kumar *et al.*, 2022; Madona & Khafid, 2020). Selain itu Kumar *et al.* (2022) berpendapat bahwa dewan yang independen kurang mengutamakan performa keberlanjutan dan pengungkapannya dan hanya memenuhi tugasnya terkait tata kelola perusahaan tanpa meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Namun, terdapat juga temuan bahwa terdapat pengaruh independensi dewan tidak signifikan (Erin *et al.*, 2022; Jamil *et al.*, 2021; Kumari *et al.*, 2022; Saepudin *et al.*, 2021).

Sedangkan dalam Indonesia, Rudyanto & Veronica Siregar (2018) menilai hubungan efektivitas dewan komisaris dengan pelaporan keberlanjutan dengan salah satu komponen efektivitas dewan berupa independensi dan menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara efektivitas komisaris dan pelaporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris yang efektif memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kehendak pemangku kepentingan.

Pada industri sumber daya alam, Agyemang *et al.* (2020) yang spesifik membahas dalam industri sumber daya alam pertambangan di China, menemukan bahwa independensi dewan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan yang didukung oleh argumen bahwa semakin besar proporsi dewan yang independen, akan semakin tinggi pengungkapan yang diberikan. Namun, hal tersebut berbeda dengan Saepudin *et al.* (2021) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di industri pertambangan. Hal tersebut juga didukung oleh Winarsih & Solikhah (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan dalam industri sumber daya alam di Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini lebih mendukung argumen pengaruh positif karena kesesuaian dengan teori dan lebih banyak

penelitian terdahulu yang mendukung argumen tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

2.3.3. Ukuran Dewan Direksi

Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan ukuran dewan direksi terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Erin *et al.*, 2022; Thun & Zülch, 2023). Pengaruh positif signifikan didasari oleh teori legitimasi. Dewan direksi yang berukuran lebih besar cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan keberlanjutan karena adanya peningkatan kapasitas pengawasan (Kılıç & Kuzey, 2019). Sedangkan, sejalan dengan teori legitimasi, jumlah anggota direksi yang lebih banyak umumnya mempunyai keberagaman yang lebih tinggi dari segi pengalaman, keahlian, dan kemampuan memecahkan permasalahan, yang berpotensi meningkatkan reputasi (Githaiga & Kosgei, 2023; Kumar *et al.*, 2022). Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh negatif signifikan (Elaigwu *et al.*, 2024; Githaiga & Kosgei, 2023). Berdasarkan penelitian Kumar *et al.* (2021) yang spesifik membahas industri yang sensitif terhadap isu lingkungan di India, ditemukan terdapat pengaruh tidak signifikan. Selain itu, temuan pengaruh tidak signifikan ini juga didukung oleh penelitian lainnya (Adeniyi S. I., 2018; Alshbili *et al.*, 2018; Ben-Amar *et al.*, 2017; Sufian & Zahan, 2013).

Di sisi lain, dalam industri sensitif di India, Kumar *et al.* (2021) menemukan hal yang berbeda, yakni terdapat pengaruh positif signifikan ukuran dewan terhadap pelaporan keberlanjutan. Lebih spesifik lagi, di industri pertambangan Indonesia, Setiawan *et al.* (2018) juga menemukan bahwa ukuran dewan direksi pengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan karena banyaknya anggota dewan direksi mampu memberikan masukan yang lebih banyak dan beragam. Hal serupa juga ditemukan oleh Winarsih & Solikhah (2015). Berdasarkan bukti di atas, berikut hipotesis yang diajukan:

H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

2.3.4. Pengalaman Dewan Direksi

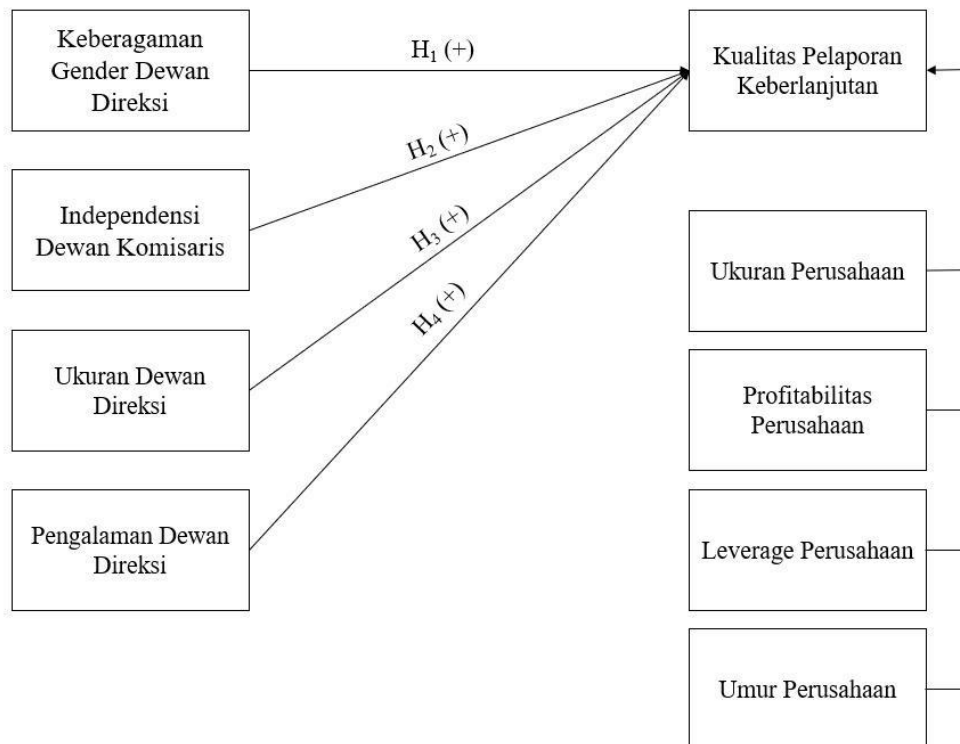
Beberapa penelitian menemukan bahwa ada hubungan positif signifikan antara pengalaman dewan direksi dan kualitas laporan keberlanjutan (Erin *et al.*, 2022; Githaiga & Kosgei, 2023; Nurulyasmin *et al.*, 2018). Adanya hubungan positif dapat dijelaskan oleh teori *resource dependency*, legitimasi, dan *stakeholder*. Teori *resource dependency* menjelaskan bahwa dewan direksi sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan kombinasi keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kualifikasi profesional, mendorong pengungkapan informasi perusahaan (Erin *et al.*, 2022; Githaiga & Kosgei, 2023). Lebih lanjut lagi, teori legitimasi menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola, termasuk dewan direksi yang memiliki pengalaman di bidang keuangan, penting dalam menjaga legitimasi organisasi karena dapat mempengaruhi keluasan dan kualitas pengungkapan isu sosial dan berkelanjutan (Erin *et al.*, 2022). Direksi yang memiliki pengalaman keuangan terbiasa melakukan *financial reporting*, sehingga lebih mungkin melaporkan performa keberlanjutan, sehingga dapat menjaga legitimasi perusahaan (Githaiga & Kosgei, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Al-Qahtani & Elgharbawy, 2020) ditemukan terdapat pengaruh negatif antara pengalaman dewan direksi dengan kualitas keberlanjutan yang dilaporkan. Direktur dengan pengalaman di bidang keuangan mungkin tidak begitu tertarik pada sosial maupun masalah lingkungan, karena perhatian utama mereka diarahkan pada keuangan dan masalah yang ada di industri. Di sisi lain, terdapat juga temuan bahwa hubungan yang ada tidak signifikan (Bear *et al.*, 2010; Umukoro *et al.*, 2019). Hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan terbuka yang diawasi oleh publik memang harus memiliki dewan dengan keahlian dan pengalaman beragam dan memadai, dan tidak ada hubungannya dengan pelaporan keberlanjutan. Hal serupa juga ditemukan oleh penelitian lainnya (Agyemang *et al.*, 2020). Setiawan *et al.* (2018) menemukan bahwa pengalaman direksi berpengaruh positif terhadap pelaporan keberlanjutan di industri sumber daya alam pertambangan Indonesia. Hal ini karena pengalaman direksi memberikan tambahan

pengetahuan dalam mengelola perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan. Berdasarkan bukti di atas, berikut hipotesis yang diajukan:

H4: Pengalaman dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

2.4. Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 5 kriteria untuk memilih sampel. Awalnya, terdapat 552 observasi yang terdiri atas 92 perusahaan di industri sumber daya alam di BEI pada 2016-2021, 58 di antaranya bergerak di industri pertambangan dan 34 sisanya di industri agrikultur. Selanjutnya, setelah dilakukan eliminasi terhadap perusahaan yang sama sekali belum pernah mengeluarkan laporan keberlanjutan, total observasi berkurang menjadi 168. Lebih lanjut lagi, laporan keberlanjutan yang dikeluarkan perusahaan wajib sudah menggunakan standar internasional GRI, sehingga jumlah observasi yang memenuhi kriteria ini turun menjadi 131. Terakhir, saham perusahaan wajib tidak sedang mengalami suspensi/penghentian sementara, sehingga total observasi yang terpilih untuk penelitian ini menjadi 130.

Pengambilan data dilakukan manual dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan terintegrasi, dan Capital IQ. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* dan regresi berganda model *fixed effect*. *Content analysis* dilakukan untuk memperoleh skor kualitas laporan keberlanjutan. Kualitas laporan keberlanjutan diukur berdasarkan skor tingkat pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang mengacu pada indikator GRI 2016. Terdapat 56 *item* pengungkapan *general disclosure*, yang terbagi atas 33 *item core* dan 23 *items non-core*. Nilai yang diperoleh untuk pengungkapan *general disclosure* adalah 56 dibagi 33 dikali dengan jumlah *item* yang diungkapkan dibagi maksimum jumlah *item* pengungkapan. Terdapat maksimum 13 *item* pengungkapan topik ekonomi, 30 *item* pengungkapan topik lingkungan, dan 34 *item* pengungkapan topik sosial. Nilai yang diperoleh untuk pengungkapan setiap topik spesifik adalah jumlah *item* yang diungkapkan

dibagi maksimum jumlah *item* pengungkapan masing-masing topik. Skor akhir untuk setiap perusahaan adalah penjumlahan dari skor pengungkapan *general disclosure* dan setiap topik spesifik. Untuk variabel independen keberagaman gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan pengalaman dewan direksi, data diambil secara manual dari laporan tahunan.

Model *fixed effect* dipilih setelah dilakukan uji pemilihan model menggunakan *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *unbalanced panel data* dikarenakan pelaporan keberlanjutan belum menjadi pelaporan yang wajib hingga mulai 2021. Oleh karena itu, hanya sebagian perusahaan sumber daya alam yang melaporkan laporan keberlanjutan pada tahun 2016 hingga 2020. Data *unbalanced* juga digunakan pada beberapa penelitian terkait pelaporan keberlanjutan sebelumnya (Elaigwu *et al.*, 2024; Ikpor *et al.*, 2022; Rudyanto & Veronica Siregar, 2018) yang tidak tersedia. Penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang secara urut diuji menggunakan *skewness and kurtosis*, *Variance-Inflating Factor (VIF)*, *Breusch–Pagan–Godfrey Test*, dan *Wooldridge Test*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif tampak pada [Tabel 1](#) di bawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Var.	Mean	Std. Dev.	Min	Maks
QSR	1,513	0,529	0,517	3,136
BGEN	0,075	0,136	0,000	0,750
BIND	0,408	0,096	0,200	0,750
BSIZE	5,208	1,751	2,000	11,000
BEXP	0,439	0,216	0,000	1,000
SIZE	13,198	0,464	11,197	14,064
FAGE	32,223	15,724	6,000	110,00
PROF	0,045	0,072	-0,117	0,420
LEV	0,311	0,221	0,000	1,447

Catatan: QSR = Kualitas laporan keberlanjutan, diukur dengan skor GRI; BGEN = Gender dewan direksi, diukur dengan proporsi direksi perempuan; BIND = Independensi dewan komisaris, diukur dengan proporsi komisaris independen; BSIZE = Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota direksi; BEXP = Pengalaman dewan direksi, diukur dengan proporsi direksi dengan pengalaman akuntansi/keuangan; SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma total aset; FAGE = Umur perusahaan, diukur dengan lama perusahaan sejak berdiri; PROF = Profitabilitas, diukur dengan laba bersih dibagi total aset; LEV = Leverage, diukur dengan total hutang dibagi total aset.

Berdasarkan [Tabel 1](#), variabel dependen, yakni kualitas laporan keberlanjutan (QSR) yang diukur menggunakan kesesuaian dengan standar GRI, memiliki rata-rata skor 1,51 dari total skor penuh 4,87. Hal ini relatif rendah karena bahkan tidak mencapai setengah dari total skor penuh. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pelaporan keberlanjutan belum menjadi hal yang diwajibkan sebelum tahun buku 2021, sehingga masih banyak perusahaan yang masih belum mampu melakukan pelaporan menggunakan standar GRI dengan komprehensif. Standar deviasi variabel ini adalah 0,529 yang relatif tidak tinggi. Nilai minimum QSR adalah 0,517 yang diperoleh oleh PT Indika Energy Tbk (INDY) pada 2016. Hal ini kemungkinan karena pada tahun 2016 ini INDY masih dalam tahap awal mengaplikasikan standar GRI pada laporan keberlanjutannya. Nilai maksimum QSR adalah 3,136 yang diperoleh oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) pada 2020. Hal ini disebabkan ANJT menggunakan standar GRI opsi komprehensif, yaitu opsi untuk melaporkan seluruh komponen GRI, baik yang inti maupun tidak. Hal ini didukung juga dengan digunakannya jasa asuror eksternal untuk menjamin kualitas laporan keberlanjutan ANJT. Selain itu, hal ini sejalan juga dengan prestasi ANJT yang meraih peringkat ‘Platinum’, atau peringkat tertinggi, dalam *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)*.

Variabel independen pertama, yakni keberagaman gender (BGEN) yang diukur dari proporsi jumlah direksi perempuan dibandingkan dengan jumlah direksi secara keseluruhan, memiliki rata-rata 0,075, yang artinya rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki dewan direksi yang 7,5% dari anggotanya adalah dewan direksi perempuan. Hasil ini tidak jauh berbeda dari temuan [Wahid \(2019\)](#) yang melakukan penelitian di Amerika, yaitu 9%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit keberagaman gender yang ada dalam suatu perusahaan dan laki-laki masih memiliki jumlah yang besar dalam menjabat sebagai direksi pada industri SDA di Indonesia. Standar deviasi variabel ini adalah 0,136 dan tidak berbeda jauh dari temuan-temuan sebelumnya ([Githaiga & Kosgei, 2023](#); [Muttakin et al., 2015](#)). Standar deviasi variabel ini relatif besar karena di atas rata-rata variabel. Nilai minimum BGEN adalah 0 dalam 92 observasi dari 130 total observasi. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan pada tahun 2016 hingga 2021, tidak mengangkat direksi perempuan sebagai bagian dari dewan direksi perusahaan. Sedangkan, nilai maksimum BGEN adalah 0,75 atau 75% dan diperoleh oleh Elnusa Tbk pada tahun 2020. Rendahnya jumlah direksi perempuan juga didukung belum adanya peraturan di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait jumlah minimal direksi yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu perusahaan publik.

Variabel independen kedua, yakni independensi dewan komisaris (BIND) yang diukur dari proporsi jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah komisaris secara keseluruhan, memiliki rata-rata 0,408, yang artinya rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki komisaris yang 40,8% dari anggotanya adalah komisaris independen. Hasil ini tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya ([Erin et al., 2022](#); [Kumar et al., 2021](#)) yang menemukan rata-rata dewan yang independen sebesar 47,1% dan 48,4%. Standar deviasi variabel ini adalah 0,096 yang relatif tidak besar dan tidak berbeda jauh dari temuan sebelumnya ([Erin et al., 2022](#)). Nilai minimum BIND adalah 0,2 dan diperoleh oleh PT Timah Tbk (TINS) pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, setiap perusahaan publik minimal mempunyai jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% dari jumlah keseluruhan jika jumlah dewan komisaris lebih dari 2 anggota. Dari hal tersebut maka ada perusahaan dalam sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut seperti PT Timah Tbk (TINS) pada tahun 2018 dan 2019 maupun Bumi Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2017. Nilai maksimum BIND adalah 0,75 dan diperoleh oleh TBS Energi Utama Tbk (TOBA), dimana 3 dari 4 komisaris merupakan komisaris independen.

Variabel independen ketiga, yakni ukuran dewan direksi (BSIZE) yang diukur dari jumlah dewan direksi, memiliki rata-rata 5,21, yang artinya rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki dewan direksi yang beranggotakan 5 hingga 6 orang. Hasil ini tidak jauh berbeda dari hasil temuan penelitian terdahulu ([Setiawan et al., 2018](#)) yang meneliti pada industri pertambangan dan menemukan rata-rata 4,74. Standar deviasi variabel ini adalah 1,75 yang dapat dikatakan relatif kecil dan tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya ([Setiawan et al., 2018](#)) yaitu 1,60. Hal ini menunjukkan data tidak tersebar/bervariasi terhadap mean. Nilai minimum BSIZE adalah 2 dan diperoleh oleh PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) pada 2020 dan PT FAP Agri Tbk (FAPA) pada 2021. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, setiap perusahaan publik minimal mempunyai 2 orang direksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perusahaan dalam sampel telah mematuhi peraturan ini. Nilai maksimum BSIZE adalah 11 dan diperoleh oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 2020 dan 2021. BUMI menyatakan dalam laporannya bahwa jumlah direksi yang awalnya berjumlah 7 ditambah menjadi 11 adalah karena untuk mendorong program BUMI untuk melakukan diversifikasi.

Variabel independen keempat, yakni pengalaman dewan direksi (BEXP) yang diukur melalui proporsi direksi dengan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan, memiliki rata-rata 0,439, yang artinya rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki dewan direksi yang 43,9% dari anggotanya memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hasil ini tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya ([Ikpor et al., 2022](#)). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di industri SDA di Indonesia kemungkinan memprioritaskan mereka yang berpengalaman di bidang akuntansi dan keuangan untuk menjadi anggota direksi. Standar deviasi variabel ini adalah 0,216 yang relatif tidak terlalu besar dan tidak jauh berbeda dari temuan sebelumnya ([Githaiga & Kosgei, 2023](#)). Nilai minimum BEXP adalah 0 dan diperoleh oleh PT RMK Energy Tbk (RMKE) pada 2021, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) pada 2020, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) pada 2019 dan 2021, serta PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) 2019 dan 2020.

Sedangkan, nilai maksimum BEXP adalah 1 atau 100%, dan diperoleh oleh PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada 2021 dan PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) pada 2017 dan 2018.

4.2. Hasil Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, data memiliki masalah heteroskedasitas yang ditemukan melalui uji *Breusch–Pagan–Godfrey Test*, yang dapat memengaruhi kesimpulan yang ditarik. Terdapat *command* dalam *software* Stata yang dapat digunakan untuk dapat mengatasi, atau memperkuat (*robust*) analisis terhadap masalah heteroskedasitas, yaitu *reg/xtreg vce(robust)* (Hoechle, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan perlakuan *robust* pada regresi yang dilakukan dalam Stata. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi model *fixed effect* yang didapat berdasarkan uji model yang dilakukan.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

<i>Variables</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Robust Standard Error</i>
BGEN	-0,188	0,210
BIND	-1,242*	0,671
BSIZE	0,041	0,033
BEXP	0,553*	0,300
SIZE	-0,231	0,676
FAGE	0,167***	0,055
PROF	-0,824	0,853
LEV	0,512**	0,249
Constant	-0,864	7,806

Catatan: QSR = Kualitas laporan keberlanjutan, diukur dengan skor GRI; BGEN = Gender dewan direksi, diukur dengan proporsi direksi perempuan; BIND = Independensi dewan komisaris, diukur dengan proporsi komisaris independen; BSIZE = Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota direksi; BEXP = Pengalaman dewan direksi, diukur dengan proporsi direksi dengan pengalaman akuntansi/keuangan; SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma total aset; FAGE = Umur perusahaan, diukur dengan lama perusahaan sejak berdiri; PROF = Profitabilitas, diukur dengan laba bersih dibagi total aset; LEV = Leverage, diukur dengan total utang dibagi total asset

*signifikan pada 10%; ** signifikan pada 5%; *** signifikan pada 1%

Hipotesis 1: Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (ditolak, tidak signifikan)

Keberagaman gender menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan perspektif budaya, peran direksi perempuan bisa terbatas di negara berkembang dan menimbulkan persepsi bahwa keanggotaan dewan perempuan hanya merupakan tanda tokenisme (Muttakin *et al.*, 2015) sehingga tidak sejalan dengan teori legitimasi. Pengaruh tidak signifikan ini juga kemungkinan disebabkan karena mayoritas jumlah direksi perempuan yang diangkat pada perusahaan-perusahaan tidak mencapai *critical mass* untuk dapat memberi pengaruh kepada perusahaan (Joecks *et al.*, 2013; Wiley & Monllor-Tormos, 2018). Terdapat beberapa contoh *critical mass* untuk minimal persentase jumlah direksi perempuan pada negara tertentu, seperti Jerman (Joecks *et al.*, 2013) dengan angka 30% dan perusahaan di industri tertentu yang masuk *Fortune 500* (Wiley & Monllor-Tormos, 2018) dengan angka 30%. *Global Gender Gap Report 2022* yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa secara umum, Indonesia berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (Pahlevi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara umum masih masuk ke dalam peringkat yang cukup rendah.

Kesenjangan gender dapat terjadi karena masih ada anggapan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki (Nuraeni & Suryono, 2021). Selain itu, didukung juga pandangan eksklusivitas pekerjaan tertentu yang dianggap kurang layak dimasuki oleh perempuan dan stigma bahwa perempuan kurang produktif dibandingkan pekerja laki-laki (Nuraeni & Suryono, 2021). Hal tersebut juga terlihat dimana belum adanya peraturan di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait jumlah minimal direksi yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu perusahaan publik. Selain itu, 92 dari total 130 observasi dalam penelitian ini tidak memiliki direksi perempuan sebagai bagian dari dewan direksi perusahaan.

Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan pada tahun 2016 hingga 2021 tidak mengangkat direksi perempuan.

Hal tersebut juga terlihat pada data tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia adalah 50,48% berjenis kelamin laki-laki dan 49,52% perempuan. Namun, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja formal berjenis kelamin perempuan di Indonesia hanya 35,57%. Sedangkan untuk negara Islandia pada tahun 2022, memiliki persentase 46,1% terkait tenaga kerja formal berjenis kelamin perempuan ([The World Bank, 2023a](#)) yang dimana persentase untuk penduduk Islandia adalah 48,68% perempuan. Namun, hal tersebut serupa dengan negara Malaysia pada tahun 2022 yang memiliki peringkat kesetaraan gender yang tidak jauh dari Indonesia. Malaysia memiliki persentase 39,2% terkait tenaga kerja formal berjenis kelamin perempuan ([The World Bank, 2023b](#)) yang dimana persentase untuk penduduk Malaysia adalah 48,9% perempuan ([Knoema, 2023](#)). Perbedaan kondisi antara Indonesia dengan Islandia, maupun persamaan kondisi Indonesia dengan Malaysia ini disebabkan faktor budaya, dimana perempuan pada masyarakat Eropa memang sejak dahulu telah menjadi tenaga kerja ([Helms & Guffey, 1997](#)). Perempuan sudah memainkan peran penting seperti pertanian yang mendominasi tahap awal pertumbuhan ekonomi hingga revolusi industri dan perpindahan dari peternakan ke pabrik ([Helms & Guffey, 1997](#)). Sedangkan, untuk perempuan pada masyarakat Asia Tenggara, masih banyak, khususnya pada kelompok konservatif dan tradisional, yang berpendapat bahwa ibu rumah tangga berperan penting untuk kesejahteraan keluarga, terutama untuk anak kecil ([Chamie, 2018](#)).

Hipotesis 2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (ditolak, signifikan negatif, $p < 0.1$)

Independensi dewan komisaris menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Menurut [Hamidah \(2020\)](#), perusahaan memberikan sinyal yang “baik” dengan memiliki anggota dewan independen, sehingga tidak perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan baik. Dari situ, perusahaan merasa bahwa dengan memiliki dewan yang independen dan sesuai dengan regulasi, maka sudah menunjukkan kesan yang baik dan laporan lainnya seperti laporan keberlanjutan tidak perlu diungkapkan secara komprehensif. [Kumar et al. \(2021\)](#) menjelaskan bahwa dewan yang independen kurang mengutamakan performa keberlanjutan dan pengungkapannya, dan hanya memenuhi tugasnya terkait tata kelola perusahaan tanpa meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, sehingga tidak sejalan dengan teori legitimasi. Penunjukan/pengangkatan dewan yang independen hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi saja ([Kumari et al., 2022](#)).

Hipotesis 3: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (ditolak, tidak signifikan)

Ukuran dewan direksi menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi pada industri SDA sebenarnya tidak mempunyai peran penting dalam pembentukan kebijakan pelaporan keberlanjutan di perusahaan, sehingga tidak sejalan dengan teori legitimasi. Hal ini kemungkinan karena sebenarnya bukan jumlah dewan direksi yang menjadi penentu utama kualitas laporan keberlanjutan, melainkan komposisi dan pengalaman di dalam dewan direksi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini dimana walaupun ukuran dewan tidak berpengaruh, pengalaman dewan justru berpengaruh positif signifikan.

Selain itu [Alshbili et al. \(2018\)](#) berargumen bahwa ukuran dewan direksi yang besar di negara berkembang kemungkinan bertujuan untuk memenuhi target perusahaan yang tidak berhubungan dengan pengungkapan isu lingkungan dan sosial. Sharon Thorne, Board Chair Deloitte Global, menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa isu keberlanjutan ini tidak menjadi perhatian bagi dewan adalah karena pemikiran jangka pendek yang menganggap isu keberlanjutan adalah masalah yang belum akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga tidak perlu menjadi fokus Perusahaan ([Deloitte, 2020](#)). Hal ini misalnya terlihat pada pernyataan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dalam laporan tahunan 2020, yang menjelaskan bahwa penambahan jumlah direksi merupakan upaya mendukung diversifikasi pada proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru (motivasi ekonomi), dan bukannya untuk meningkatkan performa sosial dan lingkungan, ataupun pelaporan keberlanjutan.

Hipotesis 4: Pengalaman dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (diterima, signifikan positif, $p < 0.1$)

Pengalaman dewan direksi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan teori *resource dependency*, dewan direksi yang berpengalaman dapat menambah nilai perusahaan dengan mendorong pengungkapan keberlanjutan perusahaan karena mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pelaporan tersebut (Al-Matari, 2022; Erin et al., 2022; Githaiga & Kosgei, 2023). Sumber daya yang dimaksud dapat berupa kombinasi keahlian, pengetahuan, dan kualifikasi profesional yang didapatkan dari pengalaman tersebut.

Penelitian ini spesifik membahas pengalaman direksi yang berkaitan dengan jabatan pada posisi akuntansi dan keuangan. Pengalaman akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan karena direksi dengan pengalaman tersebut sudah terbiasa melakukan pelaporan akuntansi keuangan (*financial accounting reporting*), sehingga lebih mungkin dan lebih mampu dalam melakukan pelaporan keberlanjutan (*sustainability accounting and reporting*) (Githaiga & Kosgei, 2023). Selain itu, direksi dengan pengalaman akuntansi dan/atau keuangan biasanya telah melalui modul *social and environmental accounting* selama masa studi mereka, sehingga mereka lebih memahami ekspektasi pemangku kepentingan terkait performa keberlanjutan perusahaan. Di Indonesia, modul *social and environmental accounting* sudah mulai dikembangkan di universitas sejak cukup lama. Bahkan, di negara maju, modul *social accounting* dalam industri pendidikan dan akademik sudah populer sejak lebih lama lagi, yaitu sejak 1980-an.

Pengaruh positif dewan berpengalaman akuntansi dan/atau keuangan ini didukung juga oleh pelatihan keberlanjutan yang semakin banyak ditujukan ke akuntan dan profesional di bidang keuangan, misalnya “ICAEW Sustainability Certificate” yang dilaksanakan oleh ICAEW (ICAEW, 2023) dan pelatihan “Corporate Sustainability Reporting” yang dilaksanakan Ikatan Akuntan Indonesia yang membahas peran akuntan dalam *Corporate Sustainability Reporting* (IAI, 2023). Hal ini membuat direksi dengan pengalaman akuntansi dan/atau keuangan berperan penting dalam mendorong perusahaan melaporkan matriks keberlanjutan dengan lebih berkualitas untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (Deloitte, 2021; Nurulyasmin et al., 2018).

Keluasan dan kualitas pengungkapan isu sosial dan berkelanjutan yang lebih baik ini akan meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat, yang sejalan dengan teori legitimasi. Legitimasi yang diperoleh perusahaan pada industri SDA ini penting karena industri ini lekat dengan isu keberlanjutan, sehingga banyak mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Adanya laporan keberlanjutan yang berkualitas dapat dijadikan sarana bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan usaha keberlanjutan mereka untuk memperoleh legitimasi (Ikpor et al., 2022).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan di industri sumber daya alam di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, karakteristik dewan yang dibahas terbatas pada keberagaman gender dewan direksi, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan pengalaman dewan direksi. Sampel ini terdiri dari 92 perusahaan di industri sumber daya alam yang terdaftar di BEI dari 2016 hingga 2021. Hasil regresi menunjukkan bahwa keberagaman gender dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan baik keberadaan direksi perempuan adalah upaya menunjukkan inklusivitas, tapi tidak memberikan pengaruh ke perusahaan. Demikian juga, kualitas laporan keberlanjutan tidak dipengaruhi oleh dewan direksi, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti independensi dewan komisaris dan pengalaman dewan direksi. Semakin tinggi independensi dewan komisaris, semakin rendah kualitas laporan keberlanjutan, yang menunjukkan bahwa komisaris independen adalah upaya perusahaan dalam pemenuhan regulasi. Yang mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif justru adalah pengalaman dewan komisaris dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, baik di Indonesia (Ekaputri & Eriandani, 2022; Farhana & Adelina, 2019; Gunawan et al., 2022; Lusiana & Sari, 2023; Rudyanto & Veronica Siregar, 2018; Seprina et al., 2023; Winarsih & Solikhah, 2015) maupun internasional (Adeniyi S. I., 2018; Alshbili et al., 2018; Ben-Amar et al.,

2017; Elaigwu *et al.*, 2024; Erin *et al.*, 2022). Secara spesifik temuan dari penelitian ini bahwa tingkat independensi dewan komisaris (pengalaman akuntansi dan/atau keuangan dewan direksi) berpengaruh negatif (positif) terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan dapat melengkapi hasil temuan penelitian lainnya di bidang pelaporan keberlanjutan sehingga memperkaya literatur terkait bidang ini.

Selain itu hasil penelitian ini juga memiliki kontribusi terhadap praktik serta bermanfaat terhadap para pengambil keputusan. Dalam hal ini terdapat implikasi bahwa investor sebaiknya tidak mengangkat anggota dewan hanya sekedar untuk memenuhi regulasi, namun sebaiknya mengangkat mereka yang mempunyai pengalaman yang dapat mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan. Selain itu, calon investor yang akan berinvestasi ke dalam industri sumber daya alam juga sebaiknya memperhatikan komposisi dewan direksi dengan pengalaman akuntansi dan/atau keuangan perusahaan tersebut karena direksi dengan pengalaman tersebut cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi keberlanjutan dan menurunkan risiko asimetri informasi. Pemerintah dan regulator juga disarankan menaruh perhatian pada komposisi dewan dalam membuat regulasi dewan di industri sumber daya alam. Saat ini belum ada aturan yang mengatur jumlah minimum direksi perempuan dalam suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang belum mengangkat direksi perempuan, dan yang mengangkat pun masih dalam jumlah sangat terbatas. Padahal, berdasarkan penelitian terdahulu, direksi perempuan baru memiliki pengaruh dalam perusahaan setelah mencapai critical mass 30% dari jumlah direksi. Oleh karena itu, regulator dapat membuat aturan terkait hal ini. Regulator juga dapat membuat rekomendasi jumlah direksi dengan pengalaman akuntansi dan/atau keuangan karena dari penelitian ini, terlihat mempunyai pengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Pertama, ketidaktersediaan data skor GRI yang dapat langsung diambil dari situs web, sehingga data perlu diambil dan diolah secara manual, yang tidak menutup ruang untuk adanya subjektivitas. Upaya yang telah dilakukan penulis untuk meminimalkan subjektivitas ini adalah dengan berkoordinasi dalam tim untuk menyamakan persepsi dan memastikan penilaian telah dilakukan sesuai panduan dan penjelasan yang ada pada standar GRI 2016. Selain itu, hasil skor yang didapatkan hanya berdasarkan jumlah item yang diungkapkan dan belum menunjukkan kedalaman pengungkapan topik spesifik. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka penelitian selanjutnya dapat membuat kriteria tambahan yang lebih spesifik bila terdapat poin-poin dalam GRI yang menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga penilaian yang dilakukan semakin terstandarisasi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan topik yang spesifik sehingga peneliti dapat lebih melihat kualitas maupun kedalaman pengungkapan yang diberikan oleh suatu perusahaan.

Daftar Pustaka

- Adeniyi S. I., & F. A. O. (2018). Effect of Board Diversity on Sustainability Reporting in Nigeria: A Study of Beverage Manufacturing Firms. *Indonesian Journal of Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *1*(1), 43–50.
- Adhariani, D., & du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *10*(4), 621–636. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Agyemang, A. O., Yusheng, K., Ayamba, E. C., Twum, A. K., Chengpeng, Z., & Shaibu, A. (2020). Impact of board characteristics on environmental disclosures for listed mining companies in China. *Environmental Science and Pollution Research*, *27*(17), 21188–21201. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08599-2>
- Al-Matari, Y. A. (2022). Do the characteristics of the board chairman have an effect on corporate performance? Empirical evidence from Saudi Arabia. *Heliyon*, *8*(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09286>
- Al-Qahtani, M., & Elgharbawy, A. (2020). The effect of board diversity on disclosure and management of greenhouse gas information: evidence from the United Kingdom. *Journal of*

- Enterprise Information Management*, 33(6), 1557–1579. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2019-0247>
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2018). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures. *Accounting Research Journal*, 33(1), 148–166. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0060>
- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2>
- Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. *Journal of Business Ethics*, 142(2), 369–383. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1>
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2020). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>
- Chamie, J. (2018). More Women Stay at Home Than Men. *YaleGlobal Online*.
- Deloitte. (2020). The Disparity Between Climate Urgency And Action: How Businesses Can Make Sustainability Programs More Meaningful. *Forbes*.
- Deloitte. (2021). The CFO as the Driver of Sustainability. *Forbes*.
- Dorn, F. M., Hafner, R., & Plank, C. (2022). Towards a climate change consensus: How mining and agriculture legitimize green extractivism in Argentina. *The Extractive Industries and Society*, 11, 101130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101130>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Ekaputri, C. W., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 72–86.
- Elaigwu, M., Abdulmalik, S. O., & Talab, H. R. (2024). Corporate integrity, external assurance and sustainability reporting quality: evidence from the Malaysian public listed companies. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 16(2), 410–440. <https://doi.org/10.1108/APJBA-07-2021-0307>
- Erin, O., Adegboye, A., & Bamigboye, O. A. (2022). Corporate governance and sustainability reporting quality: evidence from Nigeria. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(3), 680–707. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2020-0185>
- Farhana, S., & Adelina, Y. E. (2019). Relevansi Nilai Laporan Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615–628.
- Githaiga, P. N., & Kosgei, J. K. (2023). Board characteristics and sustainability reporting: a case of listed firms in East Africa. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 23(1), 3–17. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2021-0449>
- Global Reporting Initiatives. (2016). *The global standards for sustainability impacts*. Global Reporting Initiatives.
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Fauzi, H. (2022). The evolution of sustainability reporting practices in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 358, 131798. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131798>
- Hamidah, A. A. (2020). The influence of corporate governance on sustainability report management: The moderating role of audit committee. *Polish Journal of Management Studies*, 21(1), 146–157.

- Helms, M. M., & Guffey, C. J. (1997). The role of women in Europe. *European Business Review*, 97(2), 80–84. <https://doi.org/10.1108/09555349710162580>
- Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. *The Stata Journal*, 7(3), 281–312.
- IAI. (2023). *Corporate Sustainability Reporting*. IAI.
- ICAEW. (2023). *ICAEW Sustainability Certificate*. ICAEW.
- Idawati, W., & Hanifah, A. N. (2022). Pengaruh board independence, audit committee, dan managerial ownership terhadap sustainability reporting pada ASEAN corporate governance scorecard. *ULTIMA Accounting*, 14(2), 312–330.
- Ikpor, I. M., Bracci, E., Kanu, C. I., Ievoli, R., Okezie, B., Mlanga, S., & Ogbaekirigwe, C. (2022). Drivers of Sustainability Accounting and Reporting in Emerging Economies: Evidence from Nigeria. *Sustainability*, 14(7).
- Jamil, A., Mohd Ghazali, N. A., & Puat Nelson, S. (2021). The influence of corporate governance structure on sustainability reporting in Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 17(8), 1251–1278. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2020-0310>
- Joecks, J., Pull, K., & Vetter, K. (2013). Gender Diversity in the Boardroom and Firm Performance: What Exactly Constitutes a “Critical Mass?” *Journal of Business Ethics*, 118(1), 61–72. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1553-6>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Hilirisasi sumber daya alam*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-07-2017-0144>
- Knoema. (2023). *Malaysia Female population, 1960-2022 - Demographics*. Knoema. <https://knoema.com/atlas/Malaysia/topics/Demographics/Population/Female-population>
- Kumar, K., Kumari, R., & Kumar, R. (2021). The state of corporate sustainability reporting in India: Evidence from environmentally sensitive industries. *Business and Society Review*, 126(4), 513–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/basr.12247>
- Kumar, K., Kumari, R., Nandy, M., Sarim, M., & Kumar, R. (2022). Do ownership structures and governance attributes matter for corporate sustainability reporting? An examination in the Indian context. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 33(5), 1077–1096. <https://doi.org/10.1108/MEQ-08-2021-0196>
- Kumari, P. S. R., Makhija, H., Sharma, D., & Behl, A. (2022). Board characteristics and environmental disclosures: evidence from sensitive and non-sensitive industries of India. *International Journal of Managerial Finance*, 18(4), 677–700. <https://doi.org/10.1108/IJMF-10-2021-0547>
- Liu, Y., Wang, P., Gojenko, B., Yu, J., Wei, L., Luo, D., & Xiao, T. (2021). A review of water pollution arising from agriculture and mining activities in Central Asia: Facts, causes and effects. *Environmental Pollution*, 291, 118209. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118209>
- Lusiana, E., & Sari, S. P. (2023). Penerapan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–9.
- M. Shamil, M., M. Shaikh, J., Ho, P.-L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2013-0060>

- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 22–32.
- Maskun, Assidiq, H., Mukarramah, N. H. Al, & Bachril, S. N. (2021). Threats to the sustainability of biodiversity in Indonesia by the utilization of forest areas for national strategic projects: A normative review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 886(1), 012071. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012071>
- Mnif, Y., & Borgi, H. (2020). The association between corporate governance mechanisms and compliance with IFRS mandatory disclosure requirements: evidence from 12 African countries. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(7), 1371–1392. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2019-0270>
- Moaveni, S. (2022). *Energy, Environment, and Sustainability*. Cengage. <https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780357676165/>
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 353–372. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2013-0007>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.
- Nurulyasmin, B. J. A., Rashid, A., & Gow, J. (2018). Corporate board gender diversity and corporate social responsibility reporting in Malaysia. *Gender, Technology and Development*, 87–108.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK No. 51*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129651/peraturan-ojk-no-51poj032017-tahun-2017>
- Pahlevi, R. (2022). *Indeks Ketimpangan Gender Indonesia, Terburuk di Bidang Politik*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/indeks-ketimpangan-gender-indonesia-terburuk-di-bidang-politik>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). *The External Control of Organizations*. Stanford University Press.
- Putra, A. A. (2023). Managerial ability and informative earnings management: the role of CEO-commissioner relationship and board independence. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 23(4), 742–765. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2022-0067>
- Putri, V. K. M., & Gischa, S. (2021). *Komoditas Andalan Indonesia dari Hasil Pertanian, Pertambangan, dan Perkebunan*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/160000769/komoditas-andalan-indonesia-dari-hasil-pertanian-pertambangan-dan>
- Rankin, M., Ferlauto, K., McGowan, S., & McGowan, P. (2017). *Contemporary issues in accounting* (2nd ed.). Wiley.
- Rudyanto, A., & Veronica Siregar, S. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>
- Saepudin, A. R., Malya, S., Lestari, E. N., Hasbi, W., & Rachman, A. A. (2021). Analysis Of Factors Influencing The Sustainability Report Disclosure(Case Study Of Mining-Sector-Companies-Listed-In-Indonesia-Stock Exchange From 2015 To 2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1204–1217.
- Seprina, T., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Strategi industri hijau, pengungkapan laporan keberlanjutan dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan. *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(4), 425–431.

- Setiawan, D., Hapsari, R. T., & Wibawa, A. (2018). Dampak karakteristik dewan direksi terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan pertambangan di Indonesia. *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1), 1–15.
- Sufian, M. A., & Zahan, M. (2013). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure in Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 901–909. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/569>
- The World Bank. (2023a). *Labor force, female (% of total labor force) - Iceland*. World Bank Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=IS>
- The World Bank. (2023b). *Labor force, female (% of total labor force) - Malaysia*. World Bank Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?end=2022&locations=MY&start=1990>
- Thun, T. W., & Zülch, H. (2023). The effect of chief sustainability officers on sustainability reporting—A management perspective. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 2093–2110. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bse.3238>
- Umukoro, O. E., Uwuigbe, O. R., Uwuigbe, U., Adegbeye, A., Ajetunmobi, O., & Nwaze, C. (2019). Board Expertise and Sustainability Reporting in Listed Banks in Nigeria. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 331(1), 12048. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/331/1/012048>
- Wahid, A. S. (2019). The Effects and the Mechanisms of Board Gender Diversity: Evidence from Financial Manipulation. *Journal of Business Ethics*, 159(3), 705–725. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3785-6>
- Walker, J., Pekmezovic, A., & Walker, G. (2019). *Sustainable Development Goals*. John Wiley & Sons.
- Wiley, C., & Monllor-Tormos, M. (2018). Board Gender Diversity in the STEM&F Sectors: The Critical Mass Required to Drive Firm Performance. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 25(3), 290–308. <https://doi.org/10.1177/1548051817750535>
- Winarsih, A. M., & Solikhah, B. (2015). Pengaruh media, sensitivitas industri dan struktur corporate governance terhadap kualitas environmental disclosure (studi pada perusahaan high profile di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *Accounting Analysis Journal*, 2, 1–9.